

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya proses pembangunan bukanlah sekedar fenomena ekonomi, pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai oleh suatu negara, akan tetapi pembangunan memiliki perspektif yang lebih luas. Kebijakan pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjamin tersedianya lapangan kerja dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dibidang kehidupan lainnya. Dengan melakukan beberapa kebijakan guna menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perekonomian. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, dengan memahami kondisi masyarakatnya pemerintah harus benar-benar paham permasalahan apa saja yang sedang terjadi dan perlu dibenahi, maka dari itu diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru agar tercapainya pembangunan nasional dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dan merupakan fenomena penting yang dialami oleh perekonomian seluruh dunia termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor

ekonomi merupakan proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang berkembang termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan indikator perekonomian dari kinerja perekonomian suatu negara. Apabila pertumbuhan suatu negara positif maka dapat dikatakan keadaan perekonomian secara umum baik. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah, maka akan dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan PDRB, merupakan indikator keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dalam merumuskan strategi dan rencana pembangunan daerah yang memperhatikan perubahan sektor perekonomian dari tahun ke tahun sangatlah penting. PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor produksi lainnya sehingga dapat menciptakan nilai tambah.

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
DKI JAKARTA	5.82	-2.39	3.55	5.25	4.96
JAWA BARAT	5.02	-2.52	3.74	5.45	5
JAWA TENGAH	5.36	-2.65	3.33	5.31	4.98
DI YOGYAKARTA	6.59	-2.67	5.58	5.15	5.07
JAWA TIMUR	5.53	-2.33	3.56	5.34	4.95
BANTEN	5.26	-3.39	4.49	5.03	4.81

Sumber: BPS, 2024

Jawa Timur memiliki potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar hal tersebut dapat dilihat dari data pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur. Salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang besar adalah Wilayah Gerbangkertosusila Plus. Pemetaan potensi tersebut berperan dalam pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar daerah di kawasan Gerbangkertosusila Plus. Dasar pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila Plus sendiri, menurut Perda Provinsi Jawa

Timur No.47/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah No.47/1996 tentang RTRW Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan anatar daerah. Dasar hukum yang baru yaitu peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur tahun 2012 pasal 18 kawasan WP Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Untuk itu perlu pemerataan potensi supaya setiap daerah memiliki komoditas dan fungsi unggulan masing-masing. Sehingga diharapkan akan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Tabel 1. 2 Gini Rasio Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertasusila Plus tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bangkalan	0.314	0.322	0.303	0.306	0.299
Kabupaten Gresik	0.282	0.299	0.313	0.363	0.330
Kabupaten Lamongan	0.319	0.296	0.292	0.273	0.295
Kabupaten Mojokerto	0.270	0.325	0.294	0.327	0.338
Kabupaten Sidoarjo	0.311	0.340	0.347	0.373	0.359
Kabupaten Tuban	0.298	0.337	0.345	0.345	0.338
Kabupaten Bojonegoro	0.309	0.303	0.340	0.280	0.283
Kabupaten Jombang	0.331	0.334	0.332	0.310	0.339
Kota Mojokerto	0.309	0.355	0.334	0.381	0.353
Kota Surabaya	0.406	0.344	0.351	0.388	0.423
Kabupaten Sampang	0.267	0.262	0.268	0.280	0.254
Kabupaten Pamekasan	0.339	0.320	0.323	0.305	0.348
Kabupaten Sumenep	0.305	0.256	0.294	0.266	1.287

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, maka dapat dilihat bahwa gini rasio di masing-masing wilayah memiliki nilai yang berbeda-beda. Berdasarkan nilai koefisien gini dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertasusila Plus memiliki ketimpang dari yang rendah hingga sedang. Selain itu, pemetaan potensi dapat digunakan dalam mengatasi penegtasan kemiskinan. Sehingga dari potensi sektor yang unggul dapat menjadi puluang lapangan pekerjaan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertasusila Plus tahun 2013-2023 (Persen)

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bangkalan	23.23	22.38	22.57	21.41	21.32	19.59	18.90	20.56	21.57	19.44	19.35
Kabupaten Gresik	13.94	13.41	13.63	13.19	12.80	11.89	11.35	12.40	12.42	11.06	10.96
Kabupaten Lamongan	16.18	15.68	15.38	14.89	14.42	13.80	13.21	13.85	13.86	12.53	12.42
Kabupaten Mojokerto	10.99	10.56	10.57	10.61	10.19	10.08	9.75	10.57	10.62	9.71	9.80
Kabupaten Sidoarjo	6.72	6.40	6.44	6.39	6.23	5.69	5.32	5.59	5.93	5.36	5.00
Kabupaten Tuban	17.23	16.64	17.08	17.14	16.87	15.31	14.58	15.91	16.31	15.02	14.91
Kabupaten Bojonegoro	16.02	15.48	15.71	14.60	14.42	13.16	12.38	13.87	13.27	12.21	12.18
Kabupaten Jombang	11.17	19.80	10.79	10.70	10.48	9.56	9.22	9.94	10.00	9.04	9.15
Kota Mojokerto	6.65	6.42	6.16	5.73	5.73	5.50	5.15	6.24	6.39	5.98	5.77
Kota Surabaya	6.00	5.79	5.82	5.63	5.39	4.88	4.51	5.02	5.09	4.76	4.65
Kabupaten Sampang	27.08	25.80	25.69	24.11	23.56	21.21	20.71	22.78	23.76	21.64	21.76
Kabupaten Pamekasan	18.53	17.74	17.41	16.70	16.00	14.47	13.95	14.60	15.30	13.93	13.85
Kabupaten Sumenep	21.22	20.49	20.20	20.09	19.62	20.16	19.48	20.18	20.51	18.76	18.70

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Kawasan Gerbangkertasusila Plus masih sangatlah tinggi. Berdasarkan data tahun 2019-2023 Kabupaten Sampang menempati posisi pertama dengan presentasi jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila Plus tahun 2019-2023 (Persen)

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bangkalan	5.62	8.77	8.07	8.05	6.18
Kabupaten Gresik	5.40	8.21	8.00	7.84	6.82
Kabupaten Lamongan	3.89	5.13	4.90	6.05	5.46
Kabupaten Mojokerto	3.61	5.75	5.54	4.83	4.67
Kabupaten Sidoarjo	4.62	10.97	10.87	8.80	8.05
Kabupaten Tuban	2.70	4.81	4.68	4.54	4.40
Kabupaten Bojonegoro	3.56	4.92	4.82	4.69	4.63
Kabupaten Jombang	4.28	7.48	7.09	5.47	4.66
Kota Mojokerto	2.30	6.74	6.87	5.05	4.73
Kota Surabaya	5.76	9.79	9.68	7.62	6.76
Kabupaten Sampang	2.71	3.35	3.45	3.11	2.72
Kabupaten Pamekasan	2.26	3.49	3.10	1.40	1.74
Kabupaten Sumenep	2.08	2.84	2.31	1.36	1.71

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019-2023 kabupaten.kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus masih sangat tinggi. Pada tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

Wilayah Gerbangkertosusila Plus terdiri dari 11 (delapan) Kabupaten, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep serta 2 (dua) Kota, yaitu Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Wilayah Gerbangkertosusila Plus secara geodemografi memiliki luas kurang lebih 10.845,73 km² atau 22,69 % dari luas Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 14,002 juta jiwa lebih atau 33,81 % dari penduduk Jawa Timur.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertasusila Plus tahun 2019-2023 (Juta Jiwa)

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bangkalan	986.672	1.060.377	1.071.712	1.086.620	1.101.556
Kabupaten Gresik	1.312.881	1.311.215	1.320.570	1.332.664	1.344.648
Kabupaten Lamongan	1.189.106	1.344.165	1.356.027	1.371.509	1.386.941
Kabupaten Mojokerto	1.117.688	1.119.209	1.125.522	1.133.584	1.141.516
Kabupaten Sidoarjo	2.249.476	2.082.801	2.091.930	2.103.401	2.114.588
Kabupaten Tuban	1.172.790	1.198.012	1.203.127	1.209.543	1.215.795
Kabupaten Bojonegoro	1.249.692	1.301.635	1.307.602	1.315.125	1.322.474
Kabupaten Jombang	1.263.814	1.318.062	1.325.914	1.335.972	1.345.886
Kota Mojokerto	129.014	132.434	133.272	134.350	135.414
Kota Surabaya	2.896.195	2.874.314	2.880.284	2.887.223	2.893.698
Kabupaten Sampang	978.875	969.694	976.020	984.162	992.210
Kabupaten Pamekasan	879.992	850.057	853.507	857.818	862.009
Kabupaten Sumenep	1.085.227	1.124.436	1.129.822	1.136.632	1.143.295

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Maka dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan juga sektor yang potensial dikembangkan supaya memberikan efek multiplier bagi sektor-sektor ekonomi yang lain. Sehingga masing-masing pemerintah daerah dapat melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya, agar sektor yang memiliki keunggulan akan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Secara umum dapat dikatakan bahwa regionalisasi kegiatan ekonomi berhubungan erat dengan pola perkembangan, jenis ekonomi dan perubahan peranan berbagai kegiatan ekonomi itu dalam keseluruhan kegiatan ekonomi. Berkaitan hal tersebut, maka analisis perkembangan pembangunan suatu daerah, makin kecil suatu wilayah akan makin mudah dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan sumber-sumber potensialnya, sehingga akan memudahkan dalam penyusunan rencana secara komprehensif (multisektoral) dan makin mudah untuk menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Tabel 1.5 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusilaplu dari tahun 2013 hingga 2023.

Tabel 1. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Gerbangkertasusilaplu Tahun 2013-2023 (Persen)

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bangkalan	0.19	7.19	-2.66	0.66	3.53	4.22	1.03	-5.59	-2.07	-1.12	1.20
Kabupaten Gresik	6.05	7.04	6.61	5.49	5.83	5.81	5.42	-3.68	3.79	7.38	4.62
Kabupaten Lamongan	6.93	6.30	5.77	5.86	5.50	5.44	5.43	-0.40	3.43	5.56	4.28
Kabupaten Mojokerto	6.56	6.45	5.65	5.49	5.73	5.88	5.81	-1.11	4.12	5.82	5.15
Kabupaten Sidoarjo	6.89	6.44	5.24	5.51	5.80	6.01	5.99	-3.69	4.21	7.53	6.16
Kabupaten Tuban	5.85	5.47	4.89	4.90	4.98	5.15	5.14	-5.85	3.00	8.88	4.36
Kabupaten Bojonegoro	2.37	2.29	17.42	21.95	10.25	4.39	6.34	-0.40	-5.54	-6.16	2.47
Kabupaten Jombang	5.93	5.42	5.36	5.40	5.36	5.29	5.10	-1.98	3.24	5.37	5.04
Kota Mojokerto	6.20	5.85	5.74	5.77	5.65	5.80	5.65	-3.69	3.65	5.56	2.79
Kota Surabaya	7.58	6.96	5.97	6.00	6.13	6.19	6.09	-4.85	4.29	6.51	5.70
Kabupaten Sampang	6.53	0.08	2.08	6.17	4.69	4.11	1.85	-0.29	0.22	2.31	2.56
Kabupaten Pamekasan	6.10	5.62	5.32	5.35	5.04	5.46	4.92	-2.54	3.41	4.66	4.96
Kabupaten Sumenep	14.45	6.23	1.27	2.58	2.86	3.63	0.14	-1.13	2.61	3.11	5.35

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Tabel 1.6 memperlihatkan bahwa pada tahun 2013-2023 Kabupaten Sidoarjo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mencapai 6.16 artinya hal tersebut perekonomian di Kabupaten Sidoarjo mulai bangkit pasca Covid-19. Selain itu, faktor industri yang pesat di Kabupaten Sidoarjo juga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan PDRB naik maka tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan naik. Dengan naiknya pendapatan perkapita tentu konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan akan meningkat. Badan pusat statistik mengatakan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut, oleh karena itu dapat dilihat bahwa PDRB akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di butuhkan berbagai sarana dan prasarana. Di Indonesia ukuran pembangunan yang digunakan selama ini adalah PDB dan PDRB, tetapi ukuran tersebut tidak mampu menjelaskan pembangunan ekonomi, aspek sosial dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Sehingga aspek pembangunan manusia menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah.

Tabel 1. 7 Pertumbuhan PDRB Menurut Kawasan Gerbangkertosusila Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2023 (dalam miliar)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Sidoarjo	76.39	76.78	77.43	78.17	78.7	79.5	80.05	80.29	80.65	81.02	81.55
Kabupaten Mojokerto	69.84	70.22	70.85	71.38	72.36	72.64	73.53	73.83	74.15	74.89	75.53
Kabupaten Jombang	68.63	69.07	69.59	70.03	70.88	71.86	72.85	72.97	73.45	74.05	74.6
Kabupaten Bojonegoro	64.85	65.27	66.17	66.73	67.28	67.85	68.75	69.04	69.59	70.12	70.85
Kabupaten Tuban	64.14	64.58	65.52	66.19	66.77	67.43	68.37	68.4	68.91	69.67	70.34
Kabupaten Lamongan	68.9	69.42	69.84	70.34	71.11	71.97	72.57	72.58	73.12	74.02	74.53
Kabupaten Gresik	72.47	72.84	73.57	74.46	74.84	75.28	76.1	76.11	76.5	77.16	77.98
Kabupaten Bangkalan	60.19	60.71	61.49	62.06	62.3	62.87	63.79	64.11	64.36	65.05	65.75
Kota Mojokerto	74.91	75.04	75.54	76.38	76.77	77.14	77.96	78.04	78.43	79.32	80.07
Kota Surabaya	78.51	78.87	79.47	80.38	81.07	81.74	82.22	82.23	82.31	82.74	83.45
Kabupaten Sampang	56.45	56.98	58.18	59.09	59.9	61	61.94	62.7	62.8	63.39	64.13
Kabupaten Pamekasan	62.27	62.66	63.1	63.98	64.93	65.41	65.94	66.26	66.4	66.99	67.96
Kabupaten Sumenep	60.84	61.43	62.38	63.42	64.28	65.25	66.22	66.43	67.04	67.87	68.61

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Kota Surabaya dalam satu dekade atau 2013 hingga 2023 mempunyai nilai indeks pembangunan manusia tertinggi diantara Kota atau Kabupaten yang lain di wilayah Gerbangkertosusilaplus. Pada tahun 2023 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 83.45, hal itu berarti semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kota Surabaya. Kualitas sumber daya manusia harus terus didorong melalui perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka panjang investasi sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan pada kontribusi PDRB Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap PDRB Gerbangkertosusila. Tabel 1.7 menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Gerbangkertosusila dibandingkan dengan Kota lainnya yaitu sebesar Rp. 655.616,22 miliar rupiah. Kabupaten

Sidoarjo memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar Rp. 245.222,46 miliar rupiah. Data distribusi PDRB Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1. 8 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila Menurut Harga Berlaku Tahun 2023

Kabupaten / Kota	PDRB (miliar)
Kabupaten Bangkalan	16.959.9
Kabupaten Gresik	108.796.9
Kabupaten Lamongan	29.447.4
Kabupaten Mojokerto	63.699.8
Kabupaten Sidoarjo	151.613.9
Kabupaten Tuban	47.890.3
Kabupaten Bojonegoro	61.782.9
Kabupaten Jombang	30.086.2
Kota Mojokerto	5.253.0
Kota Surabaya	434.268.3
Kabupaten Sampang	14.308.284
Kabupaten Pamekasan	12.031.558.14
Kabupaten Sumenep	29.934.419

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024 (diolah)

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa pembangunan daerah di kawasan Gerbangkertosusila Plus kurang merata. Kota Surabaya sendiri yang merupakan ibu kota Jawa Timur merupakan Kawasan administrasi, maka kota Surabaya memiliki perkembangan Kawasan yang paling maju dibandingkan dengan Kawasan lainnya, khususnya kawasan Gerbangkertosusila Plus. Perbedaan pembangunan terlihat pada ketersediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang maju, tersedianya stok kapital, dan tingkat pendidikan yang tinggi sehingga tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, serta ketersediaan faktor produksi lainnya. Kawasan strategis Gerbangkertosusila Plus sendiri diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang merata sehingga pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan Gerbangkertosusila Plus bisa lebih maju dan merata. Rencana dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang maju dan merata dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama antar daerah yang efektif, diperlukan suatu kajian potensi masing-masing

Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila Plus dan keterkaitan antara sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Martono, 2008).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis konvergensi. Analisis ini bertujuan untuk melihat Analisis konvergensi digunakan untuk melihat apakah kondisi perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada di daerah kaya, jika tidak terjadi maka hal ini menunjukkan telah terjadi divergensi yaitu daerah miskin belum mampu mengejar daerah yang kaya di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terjadi konvergensi sigma pada kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus terkait indikator kesejahteraan yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, IPM, dan Rasio Gini?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terjadi konvergensi sigma pada kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus terkait indikator kesejahteraan yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, IPM, dan Rasio Gini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terjadi konvergensi sigma pada kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus terkait indikator kesejahteraan yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, IPM, dan Rasio Gini.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan informasi didalam memahami analisis ekonometrika spasial dan mengetahui konvergensi indikator kesejahteraan kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam menentukan Langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut perekonomian jawa timur terhadap perekonomian antar wilayah
- b. Dapat digunakan sebagai bahan data dasar bagi penelitian lebih lanjut yang tertarik dalam maslaah yang sama agar bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi kampus.